



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/250 /I.05/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2022 - 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif, maka perlu menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 – 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang menjaga keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 500/2720/ 04/2013 tanggal 8 Oktober 2013 hal pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022-2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi setiap perangkat daerah dan lembaga instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

Inspektur Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 250 /1.05/HK/2022

TANGGAL : 18 Februari 2022

DAFTAR PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2022 – 2024
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDAKAB LAMPUNG SELATAN

NO	PEDOMAN STRATEGIS 4.K	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIMELINE TARGET 2022-2024	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pengumpulan informasi akses pasar komoditastanaman pangan yang tersedia Pemantauan harga pangan di 17 Kecamatan komoditasLampung Selatan di tingkat petani dan eceran. Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga BerasMedium Pengembangan Pelayanan Informasi Pemasaran (PIP) Pasar Murah Efisiensi rantai pemasaran beras melalui kegiatanPengembangan Usaha Pangan Masyarakat 	<p>Target tersusunnya laporan data harga tahun 2022, 2023 dan 2024</p> <p>Berkelanjutan</p> <p>Disesuaikan dengan Instruksi Kemendag.</p> <p>- Stabilitas harga komoditas peternakan (telur, daging, susu,dll)</p> <p>- Bertambahnya jumlah Poktan/Gapoktan yang bergabung di dalam Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUM)</p> <p>Menjalin kerjasama dengan Poktan/Gapoktan.</p>	<p>- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP)</p> <p>- Pemantauan harga sembako dilakukan setiap minggu terhadap produsen.</p> <p>BULOG</p> <p>- Dinas Peternakan dan Keswan.</p> <p>- Dinas Perindustrian & Perdagangan.</p> <p>- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>Dinas Ketahanan Pangan</p>
		Mengelola Permintaan	<ul style="list-style-type: none"> Memanfaatkan Toko Tani Indonesia (TTI) dan Toko Tani Indonesia Khusus Daging sebagai saluran pemasaran yang efektif. 	<p>Bertambahnya jumlah TTI dan TTI Khusus daging.</p>	<p>Dinas Ketahanan Pangan.</p>

1	2	3	4	5	6
2	Ketersediaan Pasokan	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan Pengelolaan Impor-Ekspor Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi (melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal). <ul style="list-style-type: none"> ➢ Optimalisasi bantuan sarana produksi ➢ Mempercepat pemanfaatan PMN BULOG • Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Menjaga level CBP dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP ke level 1-1,5 juta ton ➢ Penyerapan beras sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2015 	<p>Berkelanjutan</p> <p>Mekanisme on farm dan off farm (produk non budidaya)</p> <p>Komoditas beras</p> <p>Menjaga level CBP mencapai 1-1,5 juta ton</p> <p>Komoditas beras</p>	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
			<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Pengembangan prasarana sarana pertanian : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Bantuan alat pertanian di Kabupaten Lampung Selatan ➢ Penyediaan air untuk pertanian ➢ Penyediaan lahan 	Berkelanjutan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan • Pengembangan kawasan sayur dan tanaman obat • Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan 	<p>Berkelanjutan</p> <p>Berkelanjutan</p> <p>Berkelanjutan</p>	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Kebutuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan <ul style="list-style-type: none"> - UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) - Lumbung Pangan Masyarakat • Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan populasi ternak sapi Stabilitas ketersediaan daging - Bertambahnya jumlah Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Masyarakat - Bertambahnya jumlah Usaha Pangan Masyarakat Tahap Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Peternakan dan Keswan. - Dinas Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Benih ikan Pada Pembudidaya skala kecil - Pengembangan dan Pelatihan Pembuatan Pakan Mandiri untuk Pembudi daya - Bantuan induk ikan unggul bagi pembenih ikan - Pengembangan prasarana perikanan budidaya 	Dinas Perikanan.
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Restocking (Penebaran Benih ikan) di Perairan Umum Daratan (PUD) dan Sosialisasi rumah ikan - Bantuan Paket Penangkapan Ikan untuk nelayan skala kecil - Revitalisasi alat penangkap ikan & alat bantu penangkapan yang ramah lingkungan 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi Garam 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendayagunaan Pesisir, pulau-pulau kecil dan jasa kelautan (percontohan tambak garam) 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendistribusian BBM bersubsidi oleh Pertamina 	
		Memperkuat Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penyaluran pendistribusian pangan • Pembentukan Satgas Pengawasan Distribusi Premium • Pembentukan Satgas Pengawasan Distribusi LPG khususnya yang bersubsidi 	<p>Rumah Pangan Kita (RPK) BBM</p> <p>Distribusi dari agen ke konsumen (penerima subsidi)</p> <p>LPG 3 Kg</p>	<p>BULOG</p> <p>Dinas Perindustrian & Perdagangan</p> <p>Dinas Perindustrian & Perdagangan</p>

1	2	3	4	5	6
3.	Kelancaran Distribusi	Mendorong Kerja Sama Perdagangan antar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerjasama antar daerah, a.l. dengan mengoptimalkan peran swasta dan BUMD. • Melakukan kerjasama perdagangan antar daerah dengan provinsi dan antar Kabupaten/Kota lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi <i>pilot project</i> berdasarkan komoditas atau daerah - MOU perdagangan antardaerah dengan Provinsi lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas TPHP - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Perdagangan & Perindustrian. - Bagian Perekonomian - Bagian Kerjasama
		Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pasar induk beras dan sarana konektivitanya di sentra produksi untuk Provinsi Lampung (perlu kajian lebih lanjut) • Pembangunan Jalan dan Jembatan • Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Bantuan Bidang Energi skala kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Lampung Selatan - Terbukanya akses ke daerah terisolir - Menurunnya waktu tempuh distribusi barang/jasa - Listrik masuk desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PUPR - BULOG Dinas PU dan PR Dinas Perindustrian & Perdagangan
4.	Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan satu peta lahan pertanian • Penguatan data PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen, dan pedagang besar, termasuk data stok. • Panel Harga Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia untuk komoditas padi dan lainnya - Tersedia data di pasar tradisional, pedagang besar termasuk data stok - Bertambahnya jumlah Enumerator (mesin turing) Panel Harga di Kabupaten Lampung Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Kominfo Dinas Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6
		Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan media untuk publikasi harga sembako • Tim Pemantauan Harga Sembako melalui Rakor dengan OPD dan Instansi terkait • Penyediaan data statistik produksi perikanan Sinkronisasi data dan program ke Kab/Kota dan Pusat 	<p>Data dan informasi harga sembako</p> <p>Data harga sembako</p> <p>Data produksi perikanan</p>	<p>Dinas Kominfo</p> <p>Bagian Perekonomian</p> <p>Dinas Perikanan</p>

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO